

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, DAN TINDAK LANJUT
HASIL AUDIT TERHADAP PERSEPSI KORUPSI PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KABUPATEN JEMBER**

M. FAATHIR AFIF

**Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No. 49 Jember Jawa Timur
Email: fathirafif@gmail.com**

SUMMARY

The aim of this research were to know the influence of audit opinion, audit finding and audit rectification to perception of corruption. Variable on this research is audit opinion, audit finding and audit rectification as independent variable, also perception of corruption as dependent variable. The research population is employee of Income Office Region Jember District with 16 person. The samples many 16 person and used total sampling method to answer research problems and test of hypothesis, writer was used the statistic analysis with software SPSS. Result of research indicated that audit opinion audit rectification as independen variable there is influence but not significant on perception of corruption. meanwhile audit finding there is a significant influence on perception of corruption. Simultanly, three of variable its mean audit opinion, audit finding and audit rectification there is a significant influence on perception of corruption.

Keywords: Audit opinion; Audit finding; Audit rectification; Perception of corruption

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit sebagai variabel bebas serta variabel persepsi korupsi sebagai variabel terikat. Populasi penelitian ini adalah pimpinan divisi/sub bagian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan jumlah 16 orang dan sampel yang digunakan sebanyak 16 orang dengan menggunakan metode total sampling yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan. Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik dengan program SPSS. Hasil temuan pada penelitian ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel opini audit dan tindak lanjut hasil audit mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap persepsi korupsi, sedangkan variabel temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi korupsi. Secara simultan atau bersama-sama ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.

Kata kunci: Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit dan Persepsi Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi yang merajalela di Indonesia seakan-akan tidak terbendung lagi, baik itu ditingkat pusat sampai tingkat daerah terjangkau korupsi apalagi saat mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah (OTODA). Korupsi yang terjadi di daerah termasuk pada instansi-instansi pemerintah yang langsung mempertanggungjawabkan semua laporan keuangannya pada Pemerintah Daerah. Fenomena korupsi yang banyak terjadi di Pemerintah Daerah dalam era reformasi khususnya instansi pemerintah, menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja instansi-instansi pemerintah daerah. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan daerah.

Salah satu instansi pemerintah yang notabene adalah organisasi publik milik pemerintah yang secara langsung mengelola keuangan pemerintah dan salah satu agen pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat baik secara individu dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas atas termasuk kalangan *elite* politik, investor dalam negeri maupun asing dan pemilik industri, dimana keberadaan mereka merupakan sumber pendapatan daerah selain dari semua jenis pajak, pengurusan ijin usaha dan lain sebagainya yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dinas Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan sebutan Dipenda atau Dispenda adalah organisasi yang berada di bawah Pemerintah Daerah Tingkat II yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak dana perimbangan, dan lain sebagainya. Begitu pula Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Jember. Dispenda Kabupaten Tingkat II Jember bergerak di bidang Pendapatan Daerah di bawah naungan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Dalam Negeri.

Membahas tentang korupsi, setidaknya kita harus mengetahui pengertian tentang korupsi itu sendiri. Menurut Kartono (2010:145), korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember yang menjadi sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan kemajuan infrastruktur di Jember. Namun, untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan Dispenda Kabupaten Jember sangat penting untuk selalu dilakukan audit. Menurut Agoes (2010:98), auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan

secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai keawajaran laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan tersebut diperiksa terlebih dahulu kewajarannya oleh BPK RI sebelum dilaporkan kepada DPR dan DPRD.

Opini audit menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004:112) merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, BPK seringkali menemukan temuan-temuan yang berpotensi merugikan negara. Temuan-temuan tersebut bisa juga diketemukan pada Dispenda Kabupaten Jember yang sering berkaitan dengan adanya tindak pidana korupsi dimana temuan itu ditemukan. Tobing (2004:224), temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh internal auditor salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee. Tobing (2004:296) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditee.

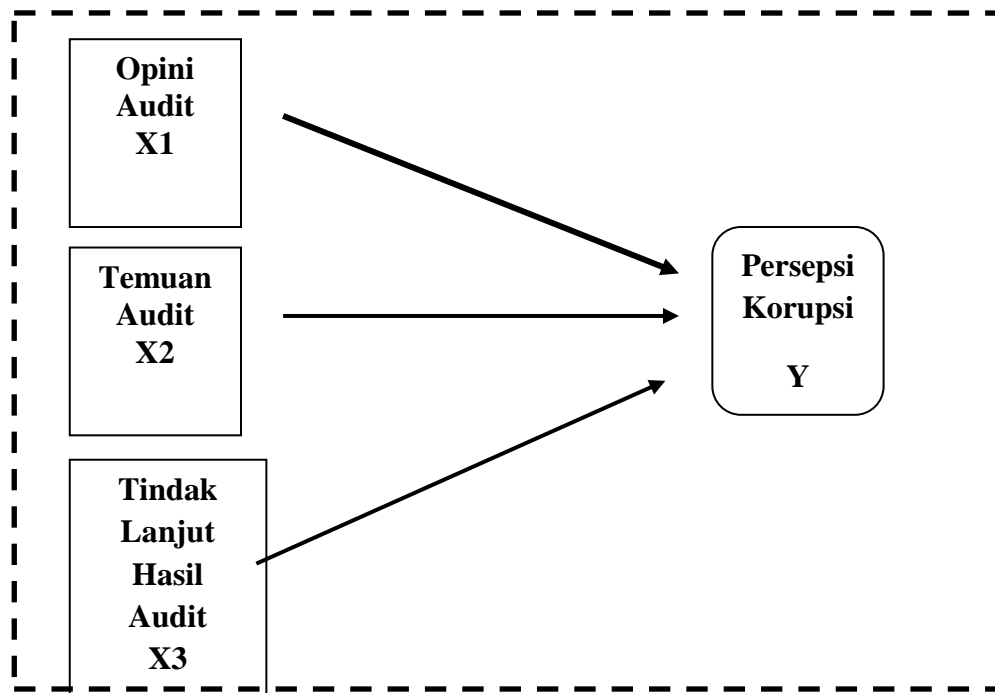
Penulis juga melakukan penelitian mengenai pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit namun pada difokuskan pada salah satu instansi pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Jember yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember yang merupakan organisasi publik milik pemerintah yang secara langsung mengelola keuangan pemerintah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dimana keberadaan mereka merupakan sumber pendapatan daerah selain dari semua jenis pajak, pengurusan ijin usaha dan lain sebagainya. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap persepsi korupsi pada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Menganalisis pengaruh temuan audit terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
3. Menganalisis pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk memperjelas pelaksanaan penelitian, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Konseptual Model Regresi
Sumber : Data diolah (2017)

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan serta disesuaikan dengan masalah penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H1: Opini Audit berpengaruh negatif terhadap Persepsi Korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. H2: Temuan Audit berpengaruh positif terhadap Persepsi Korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
3. H3: Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh negatif terhadap Persepsi Korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Opini Audit

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi perusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak membeikan pendapat, dan tidak wajar.

2. Temuan Audit

Temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sifat Temuan Audit

1. Temuan audit dapat memiliki berbagai bentuk & ukuran.
2. Temuan audit sering disebut kekurangan (deficiencies).
3. Istilah “temuan” cenderung terlalu negatif, sedangkan “kondisi” relative lebih tepat dan tidak menimbulkan sikap defensif bagi auditee.

Temuan audit menjelaskan bahwa sesuatu yang baik saat sekarang (current) atau masa lalu (histories) serta yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (future) terdapat kesalahan.

3. Tindak Lanjut Hasil Audit

Penyerahan laporan audit kepada auditee merupakan tahap akhir dari pekerjaan audit lapangan dan merupakan tahap awal pekerjaan auditor untuk memantau tindak lanjut rekomendasi audit oleh auditee. Pimpinan atau manajemen pihak auditee bertanggung jawab untuk menindak lanjuti rekomendasi audit. Auditor harus melaporkan perbaikan maupun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, yang ditemukan selama pelaksanaan audit tindak lanjut kepada pihak-pihak yang terkait (*stakeholder*). Laporan audit tindak lanjut bertujuan untuk menyediakan informasi bagi stakeholder mengenai penilaian efektivitas tindak lanjut audit kinerja serta manfaat yang

dihasilkan oleh audit kinerja (seperti penghematan biaya atau manfaat lainnya) dengan syarat :

1. Laporan harus menggambarkan hasil analisis atas manfaat yang diperkirakan dan manfaat aktual dalam periode tertentu
2. Laporan merupakan ringkasan pelaksanaan rekomendasi
3. laporan menitikberatkan pada pelaksanaan rekomendasi yang buruk
laporan menggambarkan tindakan yang akan diambil atas pelaksanaan rekomendasi yang buruk.

4. Persepsi Korupsi

Menurut Kartono (2010:145), korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (2008:57) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Semenjak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Survei tahun 2003 mencakup 133 negara. Nilai dari indeks ini sedang didebatkan, karena berdasarkan survei, hasilnya tidak bisa dihindarkan dari bersifat subjektif. Karena korupsi selalu bersifat tersembunyi, maka mustahil untuk mengukur secara langsung, sehingga digunakan berbagai parameter untuk mengukur tingkat korupsi.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Desain penelitian memuat suatu rencana tentang informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Desain penelitian merupakan sumber khusus darimana informasi diperoleh, strategi untuk mengumpulkannya dan bagaimana menganalisisnya (Murti dan Salamah, 2006:47). Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, karakteristik masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai *Explanatory Research*. *Explanatory Research* adalah penelitian untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesis. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel untuk mengetahui

apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi ataukah tidak oleh variabel lainnya (Faisal, 2007:21). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan pada semua divisi/bagian dan sub bagian sejumlah 17 orang pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember dan termasuk populasi yang relatif kecil serta mudah dijangkau, sehingga metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *total sampling* atau sensus. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan pada semua divisi/bagian dan sub bagian sejumlah 17 orang pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember baik Kepala Dinas, Kepala Bagian (Kabag), Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan Kepala UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah). Pengambilan sampel dari seluruh pimpinan divisi/bagian Dispenda Kabupaten Jember tersebut dengan pertimbangan bahwa pimpinan merupakan satu-satunya pihak yang mengetahui, berwenang dan bertanggung jawab atas kinerja pegawainya serta merupakan pejabat yang berhak dan wajib melakukan opini audit, menemukan temuan-temuan saat dilakukan audit dan menindaklanjuti hasil audit serta melakukan penilaian atas kinerja pegawai agar penyalahgunaan keuangan dan aset instansi (korupsi) dapat diminimalisir bahkan tidak pernah terjadi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Opini Audit (X_1)

Opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Indikator variabel yang diturunkan adalah:

- 1) Pelaksanaan audit oleh eksternal auditor harus berpedoman pada standar auditing.
- 2) Eksternal auditor dalam menetapkan pernyataan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan harus mendapat keyakinan apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.

- 3) Eksternal auditor memutuskan hasil audit harus berdasarkan fakta yang ditemuinya dalam proses audit.
- 4) Auditor mengevaluasi pengendalian *intern* sebagai salah satu dasar pernyataan pendapatnya (opini).
- 5) Eksternal auditor harus mendapatkan secara lengkap catatan dan pembukuan yang diperlukan sebagai bukti pendukung pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.
- 6) Materialitas suatu rekening akuntansi, salah saji menjadi faktor pertimbangan penting dalam menentukan pernyataan pendapat (opini) auditor.
- 7) Auditor harus mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan auditnya yang mencerminkan kesimpulannya.
- 8) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dapat diberikan berdasarkan pemeriksaan auditor apabila ia berkeyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum disertai dengan pengungkapan yang memadai dan prinsip akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya.

2. Temuan Audit (X_2)

Temuan audit merupakan: himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Indikator variabel yang diturunkan adalah:

- 1) Proses bisnis yang menjadi temuan audit yang sering terjadi dan berulang hal yang sama.
- 2) Faktor yang menyebabkan proses bisnis sering menjadi temuan audit.
- 3) Proses bisnis hasil temuan audit yang paling lama membutuhkan waktu penyelesaian tindak lanjut.

3. Tindak Lanjut Hasil Audit (X_3)

Tindak Lanjut Hasil Audit merupakan: langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditee. Indikator variabel yang diturunkan adalah:

- 1) Untuk mengetahui temuan audit intern sudah memadai sehingga dapat diselesaikan.
- 2) Kendala dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan intern.

- 3) Kecukupan proses penyelesaian tindak lanjut temuan audit intern.
 - 4) Penyelesaian temuan audit dan/atau aspek non finansial dimasukan sebagai unsur penilaian kinerja pegawai.
4. Persepsi Korupsi (Y)
- Persepsi Korupsi merupakan pandangan tentang tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Indikator variabel yang diturunkan adalah:
- 1) Prevalensi korupsi
 - 2) Akuntabilitas pendanaan publik
 - 3) Motivasi korupsi
 - 4) Sektor terdampak korupsi
 - 5) Efektivitas program antikorupsi

Instrumen Penelitian

Pengukuran variabel bebas, variabel antara dan variabel terikat dalam kuesioner adalah menggunakan Skala Likert (*Likert Scale*) dengan skala penilaian (skor) 1 sampai dengan 5 dengan pilihan jawaban untuk masing-masing *item* pertanyaan adalah Skor 5: Sangat Setuju (SS); Skor 4: Setuju (S); Skor 3: Netral (N); Skor 2: Tidak Setuju (TS); Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah berupa data primer sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner yang diberikan kepada responden secara langsung (Sugiyono,2005:135). Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah berupa data primer sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diberikan kepada responden secara langsung (Sugiyono, 2005:135).

Pengujian Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen

Validitas instrumen penelitian ini menyangkut ketepatan alat ukur untuk mengukur yang seharusnya diukur. Dengan demikian kuesioner penelitian ini harus mampu mengukur variabel-variabel yang hendak diukurnya, baik variabel Y maupun variabel bebas yaitu X. Untuk mengukur kadar validitas ini maka setelah dilakukan uji coba terhadap responden yang memiliki karakteristik relatif sama dengan populasi

penelitian, skor hasilnya dianalisis dengan cara mengkorelasikan nilai setiap butir pertanyaan dengan total skornya di masing-masing variabel. Rumusan korelasi yang digunakan adalah *r product-moment* (Singarimbun dan Effendi, 2006: 161). Untuk mempermudah analisis digunakan bantuan komputer program SPSS. Hasil analisis (*r* hitung) dikonsultasikan dengan *r* tabel *product-moment*. Item pertanyaan yang *r* hitungnya < dari *r* tabel, maka item tersebut dinyatakan gugur dan harus dibuang untuk diganti dengan item baru. Sebaliknya apabila *r* hitung > *r* tabel, maka item pertanyaan itu dinyatakan valid.

Reliabilitas ini menyangkut apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya sebagai alat ukur atau tidak. Alat ukur dapat dipercaya apabila digunakan beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama hasilnya relatif sama, selama aspek dalam diri subyek yang diukur belum berubah. Analisis reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan teknik *test-retest*, yakni pemberian kuesioner kepada satu kelompok yang memiliki karakteristik relatif sama dengan anggota populasi sebanyak dua kali pemberian kuesioner kedua. Rumusan yang digunakan juga menggunakan rumus *r product-moment* apabila *r* hitung < *r* tabel, maka keseluruhan butir – butir kuesioner yang ada dinyatakan reliabel. Untuk mempermudah analisis juga digunakan alat bantu komputer program SPSS.

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dalam perhitungan pengolahan data, peneliti menggunakan alat bantu yang berupa program aplikasi komputer yaitu analisis kuantitatif di mana analisis kuantitatif menggunakan model analisis regresi linier berganda karena model ini dipilih dengan tujuan ingin mengetahui seberapa besar pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi. Untuk pengolahan datanya menggunakan alat bantu program SPSS. 22 for Windows (semua hasil perhitungan dengan menggunakan komputer).

HASIL ANALISIS DATA

Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 16 (enam belas) responden sebagai sampel yang merupakan pimpinan masing-masing divisi/bagian dan sub bagian pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember dapat

diketahui gambaran umum responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir, masa kerja dan jenis kelamin.

Karakteristik responden dalam penelitian ini antara lain:

1. Sebagian besar usia responden Dispenda Kabupaten Jember dalam penelitian ini adalah: berusia produktif yakni antara 27 – 33 tahun sebanyak 8 orang (50 %).
2. Sebagian besar pendidikan terakhir responden Dispenda Jember dalam penelitian ini adalah: Sarjana (S1) sebanyak 9 orang (56%).
3. Sebagian besar masa kerja responden Dispenda Jember dalam penelitian ini adalah: 21 – 25 tahun sebanyak 7 orang (43%).
4. Sebagian besar jenis kelamin responden Dispenda Jember dalam penelitian ini adalah: laki – laki sebanyak 12 orang (75%).

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hipotesis 1: Opini Audit berpengaruh negatif terhadap Persepsi Korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Hipotesis 2: Temuan Audit berpengaruh positif terhadap Persepsi Korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
3. Hipotesis 3: Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh negatif terhadap Persepsi Korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

PEMBAHASAN

1. Opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Jember.

Opini audit merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo dan Rossieta, 2009:68). Opini audit merupakan pernyataan auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga opini audit dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dan memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Kartono (2010:145), korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum.

Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hal tersebut mengandung arti bahwa jika opini audit bagus maka terdapat hubungan terbalik terhadap tingkat

korupsi di daerah yaitu semakin baik opini audit yang diperoleh menunjukkan semakin rendah potensi korupsi di lingkungan instansi Dispenda Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini mendukung pendapat dari Tobing (2004:120) bahwa opini audit merupakan faktor penting yang menjadi tolak ukur dari efektivitas pengawasan dan penilaian kinerja pengelolaan keuangan instansi daerah sehingga persepsi korupsi dapat diminimalisir. Hal serupa juga dinyatakan dalam Setyowati (2013) yang berpendapat bahwa kualitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah daerah dapat diketahui dari opini audit, sehingga opini audit di instansi pemerintah daerah digunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menilai kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian Setawan (2012) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Dengan demikian terdapat ketidak konsistenan hasil dengan teori.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hasil penelitian maka telah sesuai dengan hipotesis awal yaitu opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan pihak Dispenda Kabupaten Jember telah menyerahkan laporan keuangan dan aset tetap sebelum 60 hari ke auditor dan telah memenuhi kaedah akuntansi yang diharapkan auditor. Proses tersebut telah sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa seluruh pihak yang diperiksa wajib untuk memberikan respon terhadap hasil laporan BPK dan harus diserahkan tidak lebih dari 60 hari setelah laporan diterima. Hal ini juga terbukti dari rekap nilai kuesioner yang terkait dengan auditor mengevaluasi pengendalian *intern* sebagai salah satu dasar pernyataan pendapatnya (opini) dan berdasarkan pemeriksaan auditor apabila ia berkeyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum disertai dengan pengungkapan yang memadai dan prinsip akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Berdasarkan hasil tersebut maka opini audit yang diberikan oleh auditor terhadap auditee dinyatakan baik karena saat auditor mengevaluasi pengendalian *intern* sebagai salah satu dasar pernyataan pendapatnya (opini), responden menyatakan setuju, sehingga persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember disinyalir bersih dari korupsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Tobing (2004:212) bahwa semakin baik opini audit yang diperoleh menunjukkan semakin rendah potensi korupsi di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Selain itu berdasarkan (*Jember:beritajatim.com, Jumat:2/6/2017*), pada tahun 2015 temuan audit oleh BPK yaitu menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan pada beberapa instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan, namun hanya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang mendapat acungan dari BPK. Semua itu terjadi karena pelaporan keuangan dan aset Dispenda Kabupaten Jember telah diserahkan tidak lebih dari 60 hari setelah laporan diterima dan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi jelaslah sudah bahwa Dispenda Kabupaten Jember telah memperoleh opini audit yang baik dibandingkan dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan.

2. Temuan audit berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Jember.

Menurut Tobing (2004:224), temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Korupsi menurut Huntington (2008:57) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel temuan audit berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Hal tersebut mengandung arti bahwa jika opini audit bagus maka terdapat hubungan terbalik terhadap tingkat korupsi di daerah yaitu semakin baik opini audit yang diperoleh menunjukkan semakin rendah potensi korupsi di lingkungan instansi Dispenda Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini mendukung pendapat dari Masyitoh, dkk (2015). Dari hasil penelitian diketahui bahwa temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi suatu instansi.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hasil penelitian maka telah sesuai dengan hipotesis awal yaitu temuan audit berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan temuan audit yang ditemukan oleh auditor terhadap auditee pada Dispenda Kabupaten Jember telah dinyatakan baik karena saat auditor melakukan audit tidak ada faktor yang menyebabkan proses audit yang sering menjadi temuan audit dan mengarah pada tindak pidana korupsi sehingga dapat dinyatakan bahwa persepsi korupsi yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tidak ada. Hal ini juga terbukti dari rekap nilai kuesioner yang menyatakan sangat setuju terkait dengan hasil tersebut sehingga temuan audit yang ditemukan oleh auditor terhadap auditee dinyatakan baik dan dapat dilanjutkan ke proses berikutnya.

3. Tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Jember.

Tobing (2004:296) menyatakan bahwa penyerahan laporan audit kepada auditee merupakan tahap akhir dari pekerjaan audit lapangan dan merupakan tahap awal pekerjaan auditor untuk memantau tindak lanjut rekomendasi audit oleh auditee. Pimpinan atau manajemen pihak auditee bertanggung jawab untuk menindak lanjuti rekomendasi audit. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Penyakit korupsi ini lebih rentan terjadi pada instansi-instansi pemerintah yang merupakan sektor publik dan salah satu agen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang berasal dari pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak dana perimbangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa seluruh pihak yang diperiksa wajib untuk memberikan respon terhadap hasil laporan BPK dan harus diserahkan tidak lebih dari 60 hari setelah laporan diterima. Setelah melakukan proses pemeriksaan atau audit, tahapan berikutnya adalah tahap pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Tahapan ini penting untuk dilakukan agar rekomendasi yang diusulkan oleh auditor dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan melaksanakan apa

yang telah direkomendasikan oleh auditor, maka pemerintah daerah telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan negara.

Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hal tersebut mengandung arti bahwa jika tindak lanjut hasil audit segera diperbaiki, maka terdapat hubungan terbalik terhadap tingkat korupsi di daerah yaitu semakin baik tindak lanjut hasil audit yang diperoleh menunjukkan semakin rendah potensi korupsi di lingkungan instansi Dispenda Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini mendukung pendapat dari Liu dan lin (2012) dan Masyitoh, dkk (2015) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat persepsi korupsi suatu instansi daerah.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hasil penelitian maka telah sesuai dengan hipotesis awal yaitu tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi di lingkungan instansi Dispenda Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan setelah dilakukan proses pemberian opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit oleh auditor dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pimpinan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta telah melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor, sehingga pimpinan Dispenda Kabupaten Jember telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan negara dengan cara selalu mencanangkan program antikorupsi sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pegawai yang korup terhadap penurunan risiko korupsi. Hal tersebut terbukti dari rekap nilai kuesioner yang menunjukkan bahwa responden menyatakan bahwa persepsi korupsi yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan pengujian pada bab terdahulu baik pengujian-pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, maka pada bagian ini peneliti ingin menarik sebuah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Opini audit mempunyai pengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Temuan audit mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi korupsi pada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
3. Tindak lanjut hasil audit mempunyai pengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran terkait dengan permasalahan dan hasil penelitian ini yaitu:

1. Dari penelitian ini diketahui bahwa pemberian opini audit oleh auditor menunjukkan hasil yang baik atau persepsi terhadap Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember yang melakukan tindakan korupsi sudah tidak ada.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung program pemberian *reward* untuk instansi pemerintah daerah seperti Dispenda Kabupaten Jember yang memperoleh opini WTP, karena hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik opini audit yang diperoleh secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan persepsi korupsi.
3. Instansi pemerintah daerah seperti Dispenda Kabupaten Jember sebaiknya memperkuat sistem pengendalian yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan serta sistem pengendalian dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja karena kedua kelemahan ini mendominasi dalam daftar jumlah temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern Dispenda Kabupaten Jember. Selain itu, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi korupsi sehingga dengan memperkuat sistem pengendalian ini diharapkan dapat menurunkan tingkat korupsi di Dispenda Kabupaten Jember. Selain itu, dilihat dari daftar jumlah temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, Dispenda Kabupaten Jember masih sedikit melakukan pelanggaran administrasi meskipun tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah secara materil. Namun, Dispenda Kabupaten Jember tetap harus memperhatikan tata cara atau prosedur penyelenggaraan pemerintahan agar pelanggaran administrasi dapat diminimalisir.
4. Berdasarkan hasil penelitian, Dispenda Kabupaten Jember perlu mewaspadaai adanya pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan selama proses penyelenggaraan aturan, terutama untuk tindakan yang dapat menimbulkan

- kerugian negara termasuk yang masih bersifat potensi karena kedua hal tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap persepsi korupsi.
5. Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Jember berpengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi sehingga auditor dapat meningkatkan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh auditor. Diharapkan dengan adanya peran auditor dalam pengawasan tindak lanjut audit ini dapat menurunkan tingkat korupsi di Dispenda Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Agoes, Dharma, 2010, *Manajemen Prestasi Kerja*, Edisi Pertama. Rajawali Jakarta.
- Arifianti, H., Payamita, dan Sutaryo. (2013). Pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah: Studi empiris pada pemerintahan Kota/Kabupaten di Indonesia. Seminar Nasional Akuntansi XVI.
- Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., and Gangadharan, L. (2009). Propensities to engage in and punish corrupt behaviour: Experimental evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore. *Journal of Public Economies*, Vol. 93, pp. 843-851.
- Dwiputrianti, S. (2008). Efektivitas laporan hasil temuan pemeriksaan dalam mewujudkan reformasi transparansi fiskal dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. V, no. 4.
- Gujarati, Damodar. 2001. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Gupta, S., Davoodi H., and Alonso-Terme R. (2002). Does corruption effect income inequality and poverty? *Economics of Governance*, vol. 3, p. 23-45.
- Heriningsih, Maria. 2012. Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- Kartono, Kartini, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Andi. Jakarta.
- Kinney, W. R., and McDaniel, L. S. (1989). Characteristics of firms correcting previously reported quarterly earnings. *Journal of Accounting and Economics*,

vol. 11, pp. 71-93.

- Lessmann, C., and Markwardt, G. (2010). One size fits all? Decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats. *World Development*, vol. 38, no. 4, pp. 631-646.
- Liska, Damiati. 2016. Pengaruh Hasil Audit Pemerintahan terhadap Tingkat Persepsi Korupsi di Kejaksaan. *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah.
- Liu, J. and Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from
- Mardiasmo. (2005). Akuntansi sektor publik. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Masyitoh, Rizki Diah. 2015. Pengaruh Opini Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008 – 2010. *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Universitas Indonesia.
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia *Journal of Political Economy*, vol. 115, no. 2, pp. 200-249.
- Reni, Sarah. 2014. Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia. *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Universitas Indonesia.
- Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariate*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia.
- Singarimbun, Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan Kedelapan Belas. Jakarta: LP3ES.
- Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. *IMF Staff Papers*, vol. 45.
- Tobing Riduan dan Nirwana. 2004. *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Atalya Rileni Sucedo.
- Wendy, Budianto. 2015. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Gender terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2013 – 2015. *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Universitas Indonesia.
- Wibowo, A. dan Rossieta, H. (2009). Faktor-faktor determinasi kualitas audit-Suatu studi dengan pendekatan Earnings Surprise Benchmark.
- Yuda, H. (2010). Korupsi dan industrialisasi pilkada. (www.antikorupsi.org. Diakses 20 Desember 2013)